**PENGENDALIAN PENCEMARAN BAHAN BERBAHAYA DAN
BERACUN (B3) DI WILAYAH LAUT BALIKPAPAN**
*POLLUTION OF HAZARDOUS AND TOXIC MATERIALS (B3) IN BALIKPAPAN
MARINE REGION*

Robinson Parsaoran Sitompul, Susilo Handoyo, Roziqin
Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Balikpapan

Abstrak

Mencari dan menemukan keserasian dalam hukum tidaklah sulit dan tidak juga mudah. Kesulitan mencapai hukum yang ideal adalah pihak-pihak yang bersengketa atau berurusan dengan hukum dalam mencapai kepuasan atau hasil yang diterima dengan lapang dada. Kemudahan dalam mencapai hukum yang ideal apabila terjadi keharmonisan antara teori dan praktik. Sehingga pengelolaan, penggunaan maupun pemanfaatan sumber daya alam harus diseimbangkan dengan lingkungan hidup. Hal tersebut berdampak pada penanggulangan limbah B3 di Kota Balikpapan, Belum adanya upaya penanggulangan pencemaran B3 di lingkungan/wilayah laut Indonesia disusun dan dilakukan dalam suatu politik hukum yang memperhatikan ketentuan-ketentuan internasional yang berkaitan dengan pencemaran B3 di lingkungan/wilayah laut, selain cita hukum dan fakta-fakta pencemaran B3 di lingkungan/wilayah laut Kota Balikpapan menjadi hal dasar dalam penelitian ini. Berdasarkan Uraian Latar Belakang Diatas Maka Penulis Merumuskan Masalah Bagaimanakah pengendalian pencemaran bahan berbahaya dan beracun (B3) di wilayah laut Balikpapan. Pendekatan masalah yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan yuridis empiris pendekatan masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat harus dilakukan di lapangan dengan menggunakan metode dan teknik penelitian lapangan, mengadakan kunjungan kepada masyarakat dan berkomunikasi dengan para anggota masyarakat. Kesimpulan dalam penelitian ini Pengendalian pencemaran bahan berbahaya dan beracun (B3) di wilayah laut Balikpapan yang dilakukan oleh dinas lingkungan hidup Provinsi Kalimantan Timur adalah: Perusahaan pertambangan dan industri diwajibkan melaksanakan langkah-langkah pengamanan teknis terhadap B3 yang meliputi: Pengadaan, penyimpanan, pengelolaan, pengemasan, dan pengangkutan B3, makin turunnya kualitas lingkungan hidup.

Kata Kunci : Politik Hukum, Pengendalian Lingkungan, Pencemaran Limbah B3

Abstract

Finding and finding harmony in law is neither difficult nor easy. Difficulties in reaching the ideal law are the parties in dispute or dealing with the law in achieving satisfaction or results received gracefully. Ease in achieving the ideal law if harmony occurs between theory and practice. So that the management, use and utilization of natural resources must be balanced with the environment. This has an impact on the management of B3 waste in the city of Balikpapan. The absence of efforts to control B3 pollution in the environment / sea area of Indonesia is compiled and carried out in a legal politics that takes into account international provisions relating to B3 pollution in the environment / sea area, other than the legal ideal. and the facts of B3 pollution in the environment / sea area of Balikpapan City are the basic things in this research. Based on the background description above, the writer formulates the problem of how to control the pollution of hazardous and toxic substances (B3) in the Balikpapan sea area. The problem approach used by the author is an empirical juridical approach to the problem approach that is researched with a real legal nature or in accordance with the reality that lives in the community must be done in the field using field research methods and techniques, holding visits to the community and communicating with community members. The conclusions in this research are the control of hazardous and toxic substances (B3) in the sea area of Balikpapan carried out by the East Kalimantan Province environmental service department are: Mining and industrial companies are required to implement technical safety measures for B3 which include: Procurement, storage, management, B3 packaging and transportation, the quality of the environment decreases.

Keywords: Political Law, Environmental Control, B3 Waste Pollution

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia mempunyai kekayaan keanekaragaman hayati dan sumber daya alam yang melimpah. Kekayaan itu perlu dilindungi dan dikelola dalam suatu sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terpadu dan terintegrasi antara lingkungan laut, darat, dan udara berdasarkan wawasan Nusantara. Indonesia juga berada pada posisi yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim. Sedangkan kegiatan pembangunan membutuhkan sumber daya alam yang semakin meningkat. Kegiatan pembangunan juga mengandung risiko terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan. Jenis-jenis pencemaran lingkungan hidup terdiri dari pencemaran air, pencemaran panas, pencemaran tanah, pencemaran yang disebabkan pestisida, pencemaran akibat radiasi, pencemaran suara dan pencemaran udara.

Usaha untuk meraih kesuksesan dalam penanggulangan pencemaran B3 di lingkungan/wilayah laut di Kota Balikpapan memerlukan suatu politik hukum sebagai kebijakan dasar untuk menentukan arah, bentuk, maupun isi hukum dalam menanggulangi pencemaran B3 tersebut. Dalam melaksanakan politik hukum, harus disadari bahwa banyak faktor yang mempengaruhinya, tidak hanya faktor masyarakat yang bagaimana akan di bangun atau cita-citakan, atau hanya tergantung pada kehendak pembentuk undang-undang, atau lembaga yang diberi wewenang menciptakan undang-undang, tetapi juga dipengaruhi oleh realitas sosial dan tradisi-tradisi yang terdapat dalam masyarakat Indonesia serta

realita yang berkembang didunia internasional, mengingat Indonesia sebagai salah satu anggota masyarakat dari masyarakat dunia berdasarkan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Politik hukum memberikan penjelasan bagaimana sebaiknya hukum dibentuk sesuai dengan tujuan negara dan perkembangan-perkembangan dunia internasional. Politik hukum menitik beratkan pada kebijakan yang akan ditempuh dalam mengadakan pembaharuan hukum serta perubahan-perubahan yang harus dilakukan terhadap lembaga hukum (perundang-undangan dengan segala aspek yang ada) guna menyesuaikan diri dengan perkembangan dunia di era globalisasi ini. Hal ini menuntut kalangan hukum untuk melakukan pendekatan interdisipliner dan lintas sektoral. Beberapa sektor yang terkait dapat disebutkan diantaranya sektor kependudukan, kesehatan, transmigrasi, pemukiman dan perumahan, pertambangan, perindustrian, pertanian, kehutanan, kelautan, perdagangan, perikanan, pengairan, penataan ruang, dan sektor-sektor lain.¹

Penegakan hukum harus ditingkatkan, hukum harus mampu menjelaskan kriteria baku dari pada kerusakan lingkungan hidup dan karena kasus kerusakan lingkungan hidup oleh limbah industri/perusahaan lebih disebabkan oleh pemahaman terhadap batas kerusakan dan dampak yang ditimbulkan tidak diantisipasi oleh ketentuan atau undang-undang pengelolaan lingkungan hidup. Dengan undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang telah disempurnakan ini diharapkan semua permasalahan lingkungan hidup dapat diselesaikan dengan baik dan tuntas, para

¹ Askin Mohammad, Hukum Lingkungan, Penerbit Yayasan Peduli Energi Indonesia (YPEI), Jakarta, 2008, hlm. 48

pelaku dapat dikenakan pidana setimpal dengan perbuatannya. Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 H UUD NRI 1945. Demikian juga untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana yang tercantum dalam alinea ke-4 Pembukaan UUD NRI 1945. Ketentuan ini menegaskan kewajiban negara dan tugas pemerintah untuk melindungi segenap sumber-sumber dalam lingkungan hidup Indonesia guna kebahagiaan seluruh rakyat Indonesia. Lebih konkrit pemikiran dasar tersebut diatur di dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 sebagai berikut “ Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Ketentuan tersebut memberikan hak penguasaan kepada negara atas seluruh sumber daya alam Indonesia dan memberikan kewajiban kepada negara untuk menggunakannya bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dan juga untuk mencapai kebahagiaan hidup yang tertib, aman dan sejahtera berdasarkan landasan idiil Pancasila, maka perlu diusahakan pelestarian lingkungan hidup yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan berdasarkan kebijakan nasional yang terpadu dan menyeluruh perlu di tetapkan sebuah undangundang sebagai landasan bagi pengelolaan lingkungan hidup.² Mencari dan menemukan keserasian dalam hukum tidaklah sulit dan tidak juga mudah. Kesulitan mencapai hukum yang ideal adalah pihak-pihak yang bersengketa atau berurusan dengan hukum dalam mencapai kepuasan atau hasil yang diterima dengan lapang dada. Kemudahan dalam mencapai hukum yang ideal apabila terjadi

² Kem. Lingk. Hidup, Program Bangun Praja, Penerbit Yayasan Peduli Energy Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 10- 11

keharmonisan antara teori dan praktik. Sehingga pengelolaan, penggunaan maupun pemanfaatan sumber daya alam harus diseimbangkan dengan lingkungan hidup.

Pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya suatu sistem dengan keterpaduan sebagai ciri utamanya. Sehingga, perlu adanya suatu kebijaksanaan nasional pengelolaan lingkungan hidup yang komprehensif. Bertalian dengan hal tersebut di atas, maka peningkatan pembangunan mengandung risiko pencemaran dan perusakan lingkungan yang berakibat pada rusaknya struktur dan fungsi dasar ekosistem yang menjadi penunjang kehidupan. Hal semacam itu merupakan beban sosial, karena pada akhirnya masyarakat dan pemerintahlah yang harus menanggung beban pemulihannya. Terpeliharanya ekosistem yang baik dan sehat merupakan tanggung jawab yang menuntut peranserta setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan daya dukung lingkungan. Oleh karena itu, pembangunan (khususnya dibidang lingkungan) yang bijaksana harus dilandasi adanya wawasan lingkungan sebagai sarana untuk mencapai kesinambungan dan menjadi jaminan bagi kesejahteraan generasi sekarang dan mendatang.³

Pencemaran dilingkungan/wilayah laut disebabkan oleh empat sumber yaitu: pencemaran dari kapal, dumping, aktivitas dasar laut dan aktivitas dari daratan. Pencemaran dari kapal berasal dari operasional kapal, pembuangan sampah/limbah secara langsung ke dalam laut dan pencemaran yang berasal dari barang/material kargo yang dibawa kapal. Dumping menjadi cara yang populer dalam membuang limbah yang bersumber dari

³ I Nyoman Nurjaya, Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Perspektif Antropologi Hukum, diterbitkan atas kerjasama Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana, Arena Hukum Majalah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dengan Penerbit Universitas Negeri Malang (Malang: UM Press, 2006), hlm, 68-69.

aktivitas daratan ke dalam laut karena murah dan mudah dilakukan, sehingga tidak diperlukan pengelolaan limbah. Pencemaran yang bersumber dari aktivitas dasar laut, berasal dari hasil kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas di dasar laut. Pencemaran yang bersumber dari aktivitas daratan umumnya berasal dari pembuangan limbah industri ke dalam laut dan penggunaan pestisida dan pupuk yang berlebihan dalam pertanian yang mengakibatkan pencemaran air tanah dan air laut.⁴

Berdasarkan pandangan politik hukum tersebut diatas, maka seyogianya upaya penanggulangan pencemaran B3 di lingkungan/wilayah laut Indonesia disusun dan dilakukan dalam suatu politik hukum yang memperhatikan ketentuan-ketentuan internasional yang berkaitan dengan pencemaran B3 di lingkungan/wilayah laut, selain cita hukum dan fakta-fakta pencemaran B3 di lingkungan/wilayah laut Kota Balikpapan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Uraian Latar Belakang Diatas Maka Penulis Merumuskan Masalah Bagaimanakah pengendalian pencemaran bahan berbahaya dan beracun (B3) di wilayah laut Balikpapan.

C. Tinjauan Pustaka

1. Kerangka Teori

a. Teori Politik Hukum

Politik hukum sampai saat ini belum memiliki satu pengertian/definisi yang baku. Secara etimologis, istilah politik hukum merupakan terjemahan bahasa Indonesia dari istilah hukum Belanda *rechtspolitiek* yang merupakan bentukan dari dua kata *recht* dan *politiek*. Dalam bahasa Indonesia *recht* berarti hukum/hak. Adapun dalam kamus bahasa Belanda yang ditulis oleh van der tas, kata politik mengandung arti beleid.

Kata beleid sendiri dalam bahasa Indonesia berarti kebijakan (*policy*). Dari penjelasan itu bisa dikatakan bahwa politik hukum secara singkat berarti kebijakan hukum. Dengan kata lain, politik hukum adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak dalam bidang hukum.⁵ Ciri-ciri politik hukum yang baik dapat dilihat dari konsistensi dan harmonisasi baik secara vertikal maupun horizontal antar produk hukum yang dibentuk, sehingga tidak terjadi pertentangan antar produk hukum itu sendiri baik secara vertikal maupun horizontal.

Politik hukum dasar tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa lingkungan yang baik merupakan hak asasi bagi setiap manusia yang harus dilestarikan secara terus menerus oleh siapa saja baik negara yang diwakili pemerintah, sektor swasta maupun masyarakat itu sendiri. Lingkungan hidup (bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya) digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan bukan milik perorangan ataupun golongan/kelompok masyarakat tertentu. Teori Kewenangan Secara konseptual, istilah wewenang atau kewenangan sering disejajarkan dengan istilah Belanda "*bevoegdheid*". Berdasarkan pendapat Henc van Maarseveen sebagaimana dikutip oleh Philipus M. Hadjon dalam Sadjijono, bahwa teori kewenangan, digunakan di dalam hukum publik yaitu, wewenang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga komponen yaitu; pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum. Komponen pengaruh, ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk

⁴ R.R. Churcil and A.V. Lowe, *The Law of The Sea*, Manchester: Manchester University Press, 1999, hlm. 329

⁵ Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2004, hlm. 19-22.

mengendalikan perilaku subjek hukum. Komponen dasar hukum bahwa wewenang itu harus ditunjuk dasar hukumnya, dan komponen komformitas hukum mengandung adanya standar wewenang, yaitu itu standard umum (semua jenis wewenang), dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu). Pada konsep wewenang pemerintahan (*bestuursbevoegdheid*), tidak semua komponen wewenang yang ada dalam hukum publik, karena wewenang hukum publik memiliki cakupan luas termasuk wewenang dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.⁶

Wewenang pemerintah tersebut dapat diterjemahkan, bahwa atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan; delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya; mandat adalah terjadinya ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.⁷ Pendelegasian menurut Heinrich Triepel dalam Mustamin Daeng Matutu, dkk membedakan pendelegasian dengan mandat. Pendelegasian menimbulkan pergeseran kompetensi, sedangkan mandat membiarkan hak-hak jabatan, pengaturan kompetensi yang telah ada mendahului mandat, mandat itu dapat berupa *opdraht* (suruhan) kepada suatu alat perlengkapan (organ) untuk melaksanakan kompetensinya sendiri, maupun berupa tindakan hukum oleh pemegang suatu wewenang memberikan kekuasaan penuh (*volmacht*) kepada

sesuatu subjek lain untuk melaksanakan kompetensi atas nama si pemberi mandat dan pemberi mandat tidak kehilangan kompetensinya. Pada *delegation* terjadi bahwa si penerima delegasi melaksanakan wewenangnya yang telah diperbesar yang bekerja atas namanya dan tanggungjawabnya sendiri.⁸

Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (*rechten en plichten*). Hubungan dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri (*zelfregelen*) dan mengelola sendiri (*zelfbesturen*). Sedangkan kewajiban secara horisontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya dan kewajiban vertikal berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam satu tertib ikatan pemerintahan secara keseluruhan.⁹

b. Teori Hukum Lingkungan

Konsep *strict liability* merupakan teori hukum lingkungan yang pertama kali diintrodusir dalam hukum Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Hal ini sejalan dengan prinsip penegakan hukum lingkungan terhadap usaha pertambangan batu bara sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan. Untuk itu diperlukan kaidah-kaidah tentang perilaku manusia terhadap lingkungan, baik langsung maupun tidak langsung.¹⁰

Takdir Rahmadi menggunakan sebutan pembidangan Hukum

⁶. Sadjijono, *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2008, hlm. 52.

⁷. Mustamin Daeng. Matutu, dkk, 2004, *Mandat, Delegasi, Atribusi Dan Implementasinya di Indonesia*, UII Press Yogyakarta, hlm. 112

⁸. Heinrich Triepel dalam Mustamin Daeng. Matutu, dkk, *Ibid*, hlm 64-65.

⁹. Bagir Manan dalam Ridwan HR, *Ibid*, hlm 102.

¹⁰ Siti Sundari Rangkuti, op.cit, 2000, hlm 5

Lingkungan dan merupakan salah satu cabang dalam disiplin ilmu hukum yang berkaitan dengan pengaturan perlindungan lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam. Sedangkan Abdulrahman memberikan batasan pengertian hukum lingkungan dalam pengertian yang sederhana yaitu “hukum lingkungan adalah hukum yang mengatur tatanan lingkungan dan/atau lingkungan hidup”. Dengan demikian pengertian hukum lingkungan itu sangat luas, tergantung dari mana melihatnya, sebab “hukum lingkungan” menempati pelbagai titik silang hukum klasik yaitu hukum publik dan hukum privat.¹¹ Di samping hukum lingkungan pemerintahan (*bestuursrechtelijk*) yang dibentuk oleh pemerintah pusat dan daerah. Selanjutnya Drupsteen membagi hukum lingkungan pemerintahan dalam beberapa bidang, yaitu hukum kesehatan lingkungan, hukum perlindungan lingkungan, dan hukum tata ruang.¹²

Tidak dapat disangkal bahwa adanya hukum lingkungan untuk mengendalikan perilaku manusia agar tidak merusak lingkungan. Namun jika hukum lingkungan dikatakan untuk menghindari berkurangnya sumber daya alam, agak sulit diterima. Sumber daya alam jika dihadapkan dengan pembangunan, bagaimanapun juga akan berkurang. Namun demikian, harus tetap dijaga fungsi sumber daya alam sebagai bagian dari lingkungan hidup sehingga kualitasnya dapat mendukung kelangsungan kehidupan. Menghadapi aktivitas pembangunan, hukum lingkungan difungsikan untuk menjamin tetap terpeliharanya kelestarian kemampuan lingkungan hidup, sehingga

generasi mendatang tetap mempunyai sumber dan penunjang bagi kesejahteraan dan mutu hidupnya.

2. Kerangka Konseptual

a. Konsep Lingkungan Hidup

Hukum lingkungan dalam arti yang paling sederhana adalah hukum yang mengatur tatanan lingkungan. Dengan tumbuhnya pengertian dan kesadaran untuk melindungi dan memelihara lingkungan hidup ini maka tumbuh pula perhatian hukum, sehingga menyebabkan tumbuh dan berkembangnya cabang hukum yang disebut hukum lingkungan. Menurut Koesnadi Hardjasoemantri, menyatakan: “Hukum lingkungan merupakan instrumentarium yuridis bagi pengelolaan lingkungan. Mengingat pengelolaan lingkungan terutama dilakukan oleh pemerintah, maka hukum lingkungan sebagian besar terdiri atas hukum pemerintahan (*bestuursrecht*). Terdapat pula hukum lingkungan keperdataan (*privat rechtelijk millieurecht*), hukum lingkungan ketatanegaraan (*staatrechtelijk millieurecht*), hukum lingkungan kepidanaan (*strafrechtelijk millieurecht*), sepanjang bidang bidang hukum ini memuat ketentuan ketentuan yang bertalian dengan pengelolaan lingkungan hidup”.¹³

Menurut Emil Salim, menyatakan: “Lingkungan hidup diartikan sebagai segala benda, kondisi dan keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruang yang kita tempati dan mempengaruhi hal hidup termasuk kehidupan manusia. Batas ruang lingkungan menurut pengertian ini bisa sangat luas, namun untuk praktisnya kita batasi ruang lingkungan dengan faktor faktor yang dapat dijangkau oleh manusia seperti

¹¹ . Abdulrahman, *Pengantar Hukum Lingkungan*, Citra Adytia Bakti, Bandung, 1990, hlm 34

¹² . Muhammad Taufik Makarao, *Aspek-aspek Hukum Lingkungan*, Gramedia, Jakarta, 2004, hlm 29

¹³ M. Hadin Muhjad, *Hukum Lingkungan Sebuah Pengantar Untuk Konteks Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2015, hlm. 1.

faktor alam, faktor politik, faktor ekonomi, faktor sosial dan lain lain.”

Menurut pengertian yuridis, pengertian lingkungan hidup berdasarkan Pasal 1 angka Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan: “Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.”

Para ahli mengadakan pengelompokan lingkungan ini atas beberapa macam, secara garis besarnya lingkungan hidup manusia itu dapat digolongkan atas 3 (tiga) golongan:

- 1) Lingkungan fisik (*physical environment*) Lingkungan fisik adalah segala sesuatu di sekitar kita yang berbentuk benda mati seperti rumah, kendaraan, gunung, udara, sinar matahari dan lain lain yang semacamnya.
- 2) Lingkungan biologis (*biological environment*) Lingkungan biologis adalah segala sesuatu yang berada di sekitar manusia yang berupa organisme hidup lainnya selain dari manusia sendiri, binatang, tumbuh-tumbuhan, jasad renik(plankton) dan lainlain.
- 3) Lingkungan sosial (*social environment*) Lingkungan sosial adalah manusia lain yang berada disekitarnya seperti tetangga, teman dan lain-lain.¹⁴

b. Konsep Baku Mutu Lingkungan Hidup

Berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan: “Baku

mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.” Pengertian tersebut memberikan pemahaman bahwa baku mutu lingkungan merupakan rambu rambu yang menetapkan fungsi lingkungan hidup yang baik untuk kehidupan. Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan: “Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.”

Penentuan tolak ukur apakah limbah dari suatu industri/pabrik telah menyebabkan pencemaran atau tidak, maka digunakan dua sistem baku mutu limbah, yaitu:

- 1) Menetapkan suatu effluent standard, yaitu kadar maksimum limbah yang diperkenankan untuk dibuang ke media lingkungan, seperti air, tanah, dan udara. Kadar maksimum bahan polutan yang terkandung dalam limbah tersebut ditentukan pada saat limbah tersebut ditentukan, yaitu ketika limbah meninggalkan pabrik/industri.
- 2) Menetapkan ketentuan tentang stream standard, yaitu penetapan batas kadar bahan pollutant pada sumber daya tertentu, seperti sungai, danau, waduk, perairan pantai dll.¹⁵

c. Konsep Pencemaran Laut dan Sumber Pencemaran Laut

- 1) Pencemaran Laut

¹⁴ Fuad Amsyari, Prinsip Prinsip Masalah Pencemaran Lingkungan, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1977, hlm.11-12

¹⁵ Harun M. Husein, Berbagai Aspek Hukum Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Bumi Aksara, Jakarta, 1992, hlm. 189-190

Pencemaran dapat diartikan sebagai bentuk Environmental impairment, yakni adanya gangguan, perubahan, atau kerusakan. Pencemaran Laut merupakan masalah yang dihadapi bersama oleh masyarakat internasional. Pengaruhnya bukan saja menjangkau seluruh kegiatan yang berlangsung di laut, melainkan juga menyangkut kegiatan-kegiatan yang berlangsung di wilayah pantai, termasuk muara-muara sungai yang berhubungan dengan laut. Pada dasarnya laut itu mempunyai kemampuan alamiah untuk menetralkan zat-zat pencemar yang masuk ke dalamnya. Akan tetapi apabila zat-zat pencemar tersebut melebihi batas kemampuan air laut untuk menetralkannya, maka kondisi itu dikategorikan sebagai pencemaran.¹⁶

Sedangkan definisi pencemaran laut yang dikemukakan dalam Pasal 1 angka 4 UNCLOS 1982, dikatakan sebagai berikut : “Pencemaran lingkungan laut” berarti dimasukkannya oleh manusia, secara langsung atau tidak langsung, bahan atau energi ke dalam lingkungan laut, termasuk kuala, yang mengakibatkan atau mungkin membawa akibat buruk sedemikian rupa seperti kerusakan pada kekayaan hayati laut dan kehidupan di laut, bahaya bagi kesehatan manusia, gangguan terhadap kegiatan-kegiatan di laut termasuk penangkapan ikan dan penggunaan laut yang sah lainnya, penurunan kualitas kegunaan air laut dan pengurangan kenyamanan.”¹⁷

¹⁶ Departemen Kehakiman RI, Penelitian tentang Aspek hukum Kerjasama Regional dan Internasional dalam Pencegahan Pencemaran Laut, (Jakarta:Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1998), hlm 15

¹⁷ Mochtar Kusumaatmadja, Bunga rampai Hukum Laut, Bina Cipta, Bandung, 1978, hlm 177

Dalam konferensi Stockholm 1971, yang dimaksud dengan pencemaran laut adalah dimasukkannya secara langsung atau tidak langsung oleh perbuatan manusia suatu substansi atau bahan energi ke dalam lingkungan laut yang menyebabkan turunnya atau merosotnya kadar lingkungan laut sehingga menyebabkan turunnya atau merosotnya kadar lingkungan laut sehingga menyebabkan timbulnya bahaya bagi sumber alam hayati, kesehatan manusia, rintangan melakukan kegiatan dilaut dan mengurangi pemanfaatan dalam penggunaan lingkungan laut. Sejalan dengan itu juga maka pencemaran laut intinya adalah menurunnya kualitas air laut karena aktivitas manusia baik disengaja maupun tidak disengaja memasukkan zat-zat pencemar dalam jumlah tertentu ke dalam lingkungan laut (termasuk muara sungai) sehingga menimbulkan akibat yang negatif bagi sumber daya hayati dan nabati di laut, kesehatan manusia, aktivitas di laut, dan bagi kelangsungan hidup dari sumber daya hidup di laut.¹⁸

2) Sumber Pencemaran Laut

Apabila ditinjau dari sudut dari mana sumber pencemaran tersebut berasal, maka sumber pencemaran laut dapat dibedakan menjadi, yaitu : a. Berasal dari sumber laut itu sendiri :

- a) Kapal : pembuangan minyak, air tangki, kebocoran kapal dan kecelakaan seperti kapal pecah, kapal kandas, dan tabrakan kapal.
- b) Instalasi Minyak.
- c) air buangan sungai
- d) air buangan industri.

¹⁸ Juajir Sumardi,. Hukum Pencemaran Laut Transnasional, Citra Aditya Bakti , Bandung, 1996, hlm 29

Jika ditinjau dari sudut sumber yang menyebabkan terjadinya pencemaran laut, dapat dikategorikan menjadi sebagai berikut :

- a) pencemaran yang disebabkan oleh zat pencemar yang berasal dari darat;
- b) pencemaran yang disebabkan oleh zat pencemar yang berasal bersumber dari kapal laut;
- c) pencemaran yang disebabkan oleh dumping atau buangan sampah;
- d) pencemaran laut yang disebabkan oleh zat yang bersumber dari kegiatan eksplorasi dan eksploitasi dasar laut serta tanah dibawahnya;
- e) pencemaran laut yang disebabkan oleh zat pencemar yang bersumber dari udara.

Sedangkan ditinjau dari sudut sebab-sebab terjadinya pencemaran, maka pencemaran lingkungan laut dapat dikategorikan sebagai berikut :

- a) pencemaran laut yang disebabkan oleh kegiatan atau operasional kapal (kapal, pengeboran atau pabrik);
- b) pencemaran laut yang disebabkan karena kecelakaan (seperti kecelakaan kapal tangki karena tabrakan);
- c) pencemaran laut yang disebabkan karena limbah buangan¹⁹. Pencemaran laut disebabkan oleh beberapa faktor.¹⁹

D. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan yuridis

empiris pendekatan masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat harus dilakukan di lapangan dengan menggunakan metode dan teknik penelitian lapangan, mengadakan kunjungan kepada masyarakat dan berkomunikasi dengan para anggota masyarakat.²⁰

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini terdiri dari dua sumber yaitu data lapangan dan data kepustakaan, sedangkan jenis datanya yaitu:

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yaitu semua data yang diperoleh dari informasi yang diberikan oleh para narasumber ketika melakukan penelitian di lokasi penelitian.
- b. Data Sekunder yaitu semua data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan, meliputi: (a) bahan hukum primer; (b) bahan hukum sekunder, dan (c) bahan hukum tersier.
 - 1) Bahan Hukum Primer, yaitu: peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian ini. Bahan-bahan tersebut, UUD NRI Tahun 1945 sesudah dan sebelum amandemen, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pertambangan batu bara, lingkungan hidup dan pemerintahan daerah.
 - 2) Bahan Hukum sekunder, yakni Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti literatur-literatur, makalah-makalah dan lain-lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.
 - 3) Bahan Hukum Tersier yakni, bahan

²⁰ . Hilman Hadikusuma, Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum, Bandung: Mandara Maju, 2013, hlm. 60.

¹⁹ Ibid. Hlm 31

hukum penunjang yang mencakup bahan-bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti: kamus, kamus hukum, media, website dan pendapat para sarjana.

3. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan serangkaian kegiatan meliputi: membaca, mencatat, mengutip buku-buku literatur hukum dan non-hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, serta menelaah undang-undang dan informasi lainnya yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan, dan studi Lapangan (*Field Research*) dilakukan dengan cara melakukan wawancara terhadap para narasumber. Wawancara ini dilakukan dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu, namun dalam pelaksanaannya di lokasi penelitian.

4. Analisis Data

Data yang telah diperoleh kemudian di analisis secara kualitatif dengan mendeskripsikan data yang dihasilkan dari penelitian di lapangan kedalam bentuk penjelasan secara sistematis tersebut dapat disimpulkan secara induktif yaitu cara berfikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum dilanjutkan dengan penarikan kesimpulan yang bersifat khusus dan selanjutnya dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran-saran.

E. Pembahasan

1. Pengendalian Pencemaran Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Di Wilayah Laut Balikpapan

Prinsip otonomi daerah yang telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang dianggap perlu dalam memberikan

pelayanan kepada masyarakat. Salah satu bentuk kewenangan yang menjadi perhatian adalah kewenangan pemerintah daerah dalam menerbitkan izin, yang lahir berdasarkan wewenang yang diberikan oleh undang-undang kepada pemerintah daerah. Selain dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan pemerintah daerah dalam menerbitkan izin juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pengendalian pencemaran lingkungan, pemerintah/ kelembagaan yang berwenang melakukan upaya akan pencegahan dan penanggulangan dampak negatif serta pemulihan kualitas lingkungan memiliki peran yang sangat penting. Salah satu bentuk pengendalian pencemaran lingkungan adalah izin lingkungan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Izin lingkungan dikeluarkan oleh badan atau pejabat yang berwenang dalam bentuk Keputusan Tata Usaha Negara selanjutnya disebut KTUN. KTUN adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau juga badan hukum perdata.²¹

Dalam prakteknya, penerbitan suatu KTUN dapat juga menimbulkan kerugian terhadap masyarakat karena adanya suatu unsur kesalahan atau kekeliruan. Diterbitkannya KTUN oleh badan atau pejabat berwenang yang mengandung unsur kesalahan yang

²¹ Siti Sundari Rangkuti, Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional, (Surabaya: Airlangga University Press, 1996), hlm. 4

mengakibatkan pencemaran lingkungan akan menimbulkan kerugian bagi lingkungan dan masyarakat secara umum. Apabila hal ini terjadi, pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan di pengadilan tata usaha negara, dan meminta agar KTUN tersebut dibatalkan atau dinyatakan tidak sah. Gugatan seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan ke pengadilan tata usaha negara berisi tuntutan agar izin itu dinyatakan batal atau tidak sah oleh hakim.²²

Izin merupakan suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundang-undangan.²³ Menurut Sjachran Basah, izin adalah “perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal *concreto* berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.” Izin dapat dikatakan sebagai landasan hukum, dapat dipahami bahwa kegiatan tertentu memang tidak dapat dilakukan oleh warga masyarakat tanpa adanya izin dari organ pemerintah yang berwenang.²⁴ Sistem perizinan lingkungan sebagai instrumen pencegahan kerusakan dan/ atau pencemaran lingkungan hidup hakikatnya merupakan pengendalian aktivitas pengelolaan lingkungan hidup. Oleh karena itu, pengaturan dan penyelenggaraan perizinan lingkungan harus didasarkan pada prinsip-prinsip yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Efektifitas dan efisiensi pengendalian pencemaran air dipengaruhi oleh salah satu instrumen pencegahan pencemaran lingkungan yaitu perizinan. Dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, disebutkan bahwa izin merupakan salah satu instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Perusahaan yang kegiatannya berdampak pada lingkungan harus memiliki izin lingkungan. Izin Lingkungan terdiri dari izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan, salah satu jenis dari izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan adalah izin pembuangan limbah cair (IPLC). Izin pembuangan limbah cair adalah pembuangan limbah ke sumber air yang disediakan Pemerintah Daerah atau sumber air yang berada di bawah pengawasan Pemerintah Daerah. Izin ini sesungguhnya mutlak adanya bagi setiap usaha atau perusahaan yang aktivitasnya menimbulkan limbah cair. Dengan tiadanya izin ini, maka membuang limbah langsung ke sungai adalah perbuatan melanggar hukum dan dapat dikenai sanksi²⁵.

Penggunaan izin sebagai instrumen pengawasan ditunjukkan dengan pemberian izin-izin tertentu bagi aktivitas masyarakat. Berbagai persyaratan-persyaratan dalam pengurusan izin merupakan pengendali dalam memfungsikan izin itu sebagai alat untuk mengawasi aktivitas masyarakat, dan perbuatan yang dimintakan izin adalah perbuatan yang memerlukan pengawasan khusus.

²² Siti Sundari Rangkuti, *Op. Cit.*, hlm. 121.

²³ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, (Yuridika, Surabaya, 1993), hlm. 2-3.

²⁴ Sjachran Basah, *Pencabutan Izin Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi*. Makalah pada Penataran Hukum Administrasi dan Lingkungan di Fakultas Hukum Unair Surabaya, hlm. 3.

²⁵ Muhammad Subhi, *Perizinan Pembuangan Limbah Cair Kegiatan Industri Dalam Hubungannya Dengan Pengendalian Pencemaran Air (Studi Di Kabupaten Ketapang)*, Jurnal Universitas Tanjungpura, Vol. 2 No. 2 Tahun 2012, hlm. 10.

Pengawasan dibutuhkan sebagai perlindungan hukum bagi warga negara terhadap dampak dari penerbitan keputusan tata usaha negara. Pemerintah menjalankan pemerintahan melalui pengambilan keputusan pemerintahan yang bersifat strategis, policy atau ketentuan-ketentuan umum melalui tindakantindakan pemerintahan yang bersifat menegakkan ketertiban umum, hukum, wibawa negara, dan kekuasaan negara. Dalam Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terdapat asas-asas yang berkaitan dengan kasus yang akan dibahas, antara lain ialah asas tanggungjawab negara; asas kelestarian dan keberlanjutan; asas kehati-hatian; asas partisipatif; serta asas tata kelola pemerintah yang baik. Asas-asas ini seharusnya diperhatikan oleh pemberi izin sebelum mengeluarkan izin.

Selain asas ini, terdapat pula pengaturan mengenai apa yang harus dilakukan oleh pemberi izin apabila hasil analisis daya tampung beban pencemaran air melewati batas. “Bupati/walikota wajib menolak permohonan izin yang diajukan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan apabila berdasarkan hasil analisis penetapan daya tampung beban pencemaran air menunjukkan bahwa rencana lokasi usaha dan/atau kegiatan yang diajukan merupakan faktor penyebab terlewatinya daya tampung beban pencemaran air sesuai dengan Pasal 12 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air.

2. Pengendalian Pencemaran Lingkungan di Wilayah Laut Melalui Baku Mutu Lingkungan

Masalah lingkungan di Indonesia terutama berakar pada keterbelakangan pembangunan. Karena itu, apabila negara industri mempunyai pandangan

yang kuat untuk mengatasi masalah lingkungan dengan tidak meningkatkan pembangunan, lazim dikenal dengan pertumbuhan nol (*zero growth*), bagi Indonesia justru untuk mengatasi masalah lingkungan diperlukan pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan pembangunan nasional. Berkaitan dengan kasus yang akan dibahas, instrumen penataan yang digunakan ialah baku mutu lingkungan karena dalam mengeluarkan IPLC, pemberi izin harus melihat kelas air, daya tampung beban pencemaran air, baku mutu ambien, serta baku mutu effluent dari sungai yang akan menampung beban limbah tersebut agar kualitas airnya tetap terjaga. Penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur melalui baku mutu lingkungan hidup. Baku mutu lingkungan hidup adalah “ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.”

Sedangkan baku mutu air adalah “ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air.”Baku mutu lingkungan merupakan instrumen teknis untuk menentukan terjadinya pencemaran lingkungan hidup akibat pelaksanaan suatu izin usaha dan/atau kegiatan. Agar lingkungan hidup mampu mendukung kegiatan pembangunan yang berkesinambungan, usaha untuk memelihara dan mengembangkan mutu lingkungan hidup Indonesia penting. Baku mutu air bukan hanya merupakan salah satu instrumen penataan lingkungan, tetapi baku mutu air juga dapat menjadi instrumen pengelolaan lingkungan.

Hal ini dikarenakan dengan ditetapkannya baku mutu air pada sumber air dan memperhatikan kondisi airnya, akan dapat dihitung berapa beban zat pencemar yang dapat ditanggung adanya oleh air penerima sehingga air dapat tetap berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Beban pencemaran ini merupakan daya tampung beban pencemaran bagi air penerima yang telah ditetapkan peruntukannya. Terdapat syarat administrasi dan syarat teknis dalam pengajuan permohonan IPLC, syarat administrasi yang dimaksud adalah formulir izin; izin yang berkaitan dengan usaha/kegiatan; serta dokumen AMDAL/UKL-UPL/dokumen lain yang dipersamakan.

Sedangkan yang dimaksud syarat teknis ialah upaya pencegahan pencemaran, minimisasi air limbah, serta efisiensi energi dan sumberdaya yang harus dilakukan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan air limbah; dan kajian dampak pembuangan air limbah terhadap pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah, serta kesehatan masyarakat.²⁶

3. Pengendalian Pencemaran Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Wilayah Laut Balikpapan.

Istilah penegakan hukum dalam Bahasa Indonesia membawa kita kepada pemikiran bahwa penegakan hukum selalu dengan paksaan sehingga ada yang berpendapat bahwa penegakan hukum hanya bersangkutan dengan hukum pidana saja. Penegakan hukum memiliki arti yang sangat luas meliputi segi preventif dan represif, cocok dengan kondisi Indonesia yang unsur pemerintahnya turut aktif dalam meningkatkan kesadaran hukum

masyarakat. Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁷

Pelaksanaan atau penegakan hukum, keadilan harus diperhatikan. Hukum itu tidak identik dengan keadilan, hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barangsiapa merusak lingkungan harus dihukum : Setiap orang yang merusak lingkungan harus dihukum tanpa membeda-bedakan siapa yang merusak. Dengan demikian kita memelihara struktur ekonomi sosial masyarakat. Sebaliknya keadilan bersifat subjektif, individualistis dan tidak menyamaratakan. Penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak Badan Lingkungan Hidup (BLH) di wilayah laut Balikpapan dan Polda Kalimantan Timur terhadap pelaku pencemaran air adalah dengan melakukan tindakan preventif (pencegahan) demi menjaga keamanan dan ketentraman masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan akibat dari pencemaran lingkungan di wilayah laut Balikpapan tersebut.

Pihak Polda Kalimantan Timur melalui bidang pembinaan masyarakat telah melakukan tindakan preventif berupa himbauan baik secara tertulis maupun lisan kepada pihak pengelola pabrik kelapa sawit yang melakukan pencemaran air oleh limbah kelapa sawit. Dinas Badan Lingkungan Hidup (BLH) di wilayah laut Balikpapan bersama pemerintah daerah Kota Balikpapan telah melakukan sosialisasi tentang dampak yang ditimbulkan dari

²⁶ M Daud Silalahi, Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, (Alumni Bandung 2001), hlm. 116

²⁷ M. Daud Silalahi, Hukum Lingkungan Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia, Alumni, Bandung, 2001, hlm.48.

pencemaran limbah cair pabrik kepada masyarakat, keanekaragaman hayati, serta lingkungan hidup. Selain itu pihak Polda, Polres, Dinas Badan Lingkungan Hidup dan pemerintah Kalimantan Timur juga melakukan pendekatan dengan tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan tokoh adat agar membantu dalam upaya pencegahan kerusakan lingkungan oleh limbah cair. Namun sebagian tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan tokoh adat mengatakan bahwa pihak Kepolisian tidak pernah melakukan koordinasi dengan mereka dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran laut di wilayah Balikpapan.

Jadi penulis melihat upaya himbuan dan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Polres Kota Balikpapan dan Dinas Badan Lingkungan Hidup belum mendapat dukungan sepenuhnya dari masyarakat dan penulis juga melihat aparat penegak hukum belum konsisten dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Ini menyebabkan para pelaku pencemaran laut di wilayah Balikpapan tidak menghiraukan sanksi yang akan mereka terima atas tindak pidana yang mereka lakukan yaitu pencemaran limbah cair. Pengaturan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) Berkaitan Pengendalian Pencemaran Bahan Berbahaya dan Beracun di Wilayah Balikpapan Aspek hukum administrasi pengendalian pencemaran B3 di Wilayah Laut yang Berada dibawah Kedaulatan Indonesia dalam UUPPLH mencakup ketentuan mengenai Pengelolaan B3 dan Limbah B3, Penanggulangan dan Pemulihan Pencemaran B3, Larangan Memasukkan B3 dan limbah B3, Pengawasan B3, sanksi administratif bagi pemcemar B3 dan hak gugat pemerintah dan gugatan administratif berkaitan pencemaran B3. Aspek hukum pengendalian pencemaran

B3 di Wilayah Laut yang Berada dibawah Kedaulatan Indonesia mencakup penyelesaian sengketa diluar pengadilan.

Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia Berkaitan Pengendalian Pencemaran Bahan Berbahaya dan Beracun di Wilayah Laut yang Berada dibawah Kedaulatan Indonesia. Perlindungan dan pelestarian lingkungan perairan Indonesia, termasuk perlindungan dan pelestarian lingkungan perairan dari pencemaran B3 dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan nasional yang berlaku dan hukum internasional. Penegakan kedaulatan dan hukum di perairan Indonesia, ruang udara di atasnya, dasar laut dan tanah di bawahnya termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya serta sanksi atas pelanggaran, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Konvensi hukum internasional lainnya, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan perundang-undangan Indonesia berkaitan pengendalian pencemaran bahan berbahaya dan beracun di laut Indonesia sebagaimana diuraikan di atas antara lain Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Dengan demikian, perlindungan dan pelestarian lingkungan perairan dari pencemaran B3, baik dari aspek hukum administrasi, hukum perdata maupun hukum pidana dilakukan berdasarkan konvensi-konvensi dan undang-undang tersebut di atas. Politik Hukum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (PPPBB) Berkaitan Pengendalian Pencemaran Bahan Berbahaya dan Beracun di Wilayah Laut

yang Berada dibawah Kedaulatan Indonesia.

Aspek hukum perdata dalam pembahasan ini mencakup ganti kerugian, tanggungjawab mutlak, dan pembebasan tanggungjawab dalam pencemaran B3 di wilayah laut yang berada dibawah kedaulatan Indonesia Setiap orang yang melanggar ketentuan pengelolaan B3 dalam PPPB3 yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup dapat dijatuhi pidana berdasarkan ketentuan dalam undang-undang lingkungan hidup. Politik Hukum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (P5L) Berkaitan Pengendalian Pencemaran Bahan Berbahaya dan Beracun di Wilayah Laut yang Berada dibawah Kedaulatan Indonesia.

Aspek hukum administrasi dalam pembahasan ini mencakup pencegahan pencemaran, penanggulangan pencemaran dan pengawasan pencemaran B3 di wilayah laut yang berada dibawah kedaulatan Indonesia. Setiap orang atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang mengakibatkan pencemaran di wilayah laut yang berada dibawah kedaulatan Indonesia wajib menanggung biaya penanggulangan pencemaran serta biaya pemulihannya atau menimbulkan kerugian bagi pihak lain, akibat terjadinya pencemaran di wilayah laut yang berada dibawah kedaulatan indonesia wajib membayar ganti rugi terhadap pihak yang dirugikan.

Dari ketentuan tersebut secara umum rumusan delik lingkungan dikualifikasikan dalam delik material dan formal. Rumusan delik material terdapat dalam Pasal 98, 99, dan 112, sementara rumusan delik formal terdapat dalam Pasal 100-111, 113-115.26 Pasal 98 dan 99 UU Nomor 32 Tahun 2009

merumuskan delik lingkungan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja atau karena kelalaiannya yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Selain itu, perbuatan tersebut dapat juga mengakibatkan orang luka atau luka berat dan/atau bahaya kesehatan manusia atau matinya orang.

Seperti kasus yang terjadi di wilayah Balikpapan, dimana masih banyak industri di Semarang yang beroperasi tanpa terlebih dahulu memenuhi kewajiban di Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Selain itu masih banyak industri yang belum secara rutin enam bulan sekali menyampaikan laporan kepada Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) Semarang. Hal ini sebenarnya merupakan kewajiban pejabat Bapedalda untuk melakukan pengawasan terhadap industri baik industri kecil, menengah, maupun industri besar seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Pasal 113).

Penerapan Sanksi-Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Ketentuan hukum lingkungan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 misalnya, memuat ketentuan atau norma hukum yang berhubungan dengan hak, kewajiban, dan wewenang dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sanksi pidana merupakan salah satu jenis sanksi yang bertujuan untuk menegakkan atau

menjamin ditaatinya ketentuan hukum pengelolaan lingkungan dalam undang-undang tersebut. Lingkungan hidup yang sehat dan bersih adalah hak asasi manusia. Namun yang terjadi justru makin turunnya kualitas lingkungan hidup. Karenanya limbah industri harus ditangani dengan baik dan serius oleh pemerintah dengan mengawasi sungguh-sungguh. Sementara bagi pelaku industri harus melakukan cara-cara pencegahan pencemaran lingkungan dengan melaksanakan teknologi bersih, memasang alat pencegahan pencemaran, melakukan proses daur ulang. Yang paling penting adalah pelibatan masyarakat dalam pengawasan pengolahan limbah buangan industri agar lebih intens dalam menjaga mutu lingkungan hidup. Ikhtiar ini merupakan salah satu bentuk partisipasi dan pengawasan untuk memelihara kelestarian lingkungan hidup. Namun demikian, persoalan limbah industri akan makin kompleks dimasa mendatang.

Penanganan Limbah Industri tidak akan pernah bisa efektif dalam menjamin kelangsungan lingkungan hidup termasuk pula akan mampu menjamin derajat hidup manusia secara maksimal bilamana Negara masih “setia” dengan paradigma lama yang selalu tidak berkulit di depan “modal”. Permasalahan ini akan makin kompleks saat ini karena Industri lebih terfokus pada upaya untuk melakukan efisiensi seiring makin melambungnya biaya produksi, belanja pegawai hingga ongkos energi. Sehingga mau tak mau akan memomorduakan persoalan pembuangan limbahnya mengingat pengolahan limbah memerlukan biaya tinggi.

Sementara disisi lain negara gagal dalam melakukan penegakan hukum lingkungan. Ditengah sistem yang manipulatif, maka tersedia berbagai pilihan untuk mengurangi jumlah limbah industri yang dihasilkan, yaitu dengan

melakukan moratorium tambang terutama terhadap tambang besar, melakukan peninjauan ulang terhadap kontrak karya bahkan sampai pada tahap menghentikan pendirian industri ekstratif yang mengeruk SDA dan menghasilkan limbah yang besar dengan manfaat yang tidak seberapa bagi rakyat.²⁸

a. Dalam rangka mendapatkan Izin usaha, pengusaha diwajibkan untuk memasukan :

- 1) Uraian mengenai teknologi/proese pembuatan produksinya secara cukup jelas untuk dapat dinilai teknologi yang digunakannya;
 - 2) Daftar seluruh bahan/zat berbahaya yang digunakan dalam proses produksi yang setiap saat tersedia/tersimpan dalam lingkungan yang akan didirikan;
 - 3) Daftar seluruh macam bahan/zat berbahaya serta jumlahnya yang akan dibuang/dimasukan kedalam lingkungan baik yang berbentuk padat, cair maupun gas;
 - 4) Cara pembuangan ataupun proses netralisasi dari bahan/zat berbahaya yang akan dibuang/masuk kedalam lingkungan tersebut diatas;
- b. maupun daftar bahan/zat yang digolongkan sebagai bahan/zat berbahaya ditentukan oleh Direktur Jenderal.
- c. Untuk menanggulangi kemungkinan terjadinya pencemaran lingkungan akibat terlepasnya suatu bahan/zat yang berbahaya, pengusaha yang menggunakan bahan/zat yang berbahaya diwajibkan untuk menyusun rencana keadaan darurat (emergency plan).

²⁸ Soedjono D., Pengamanan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Akibat Industri, Alumni, Bandung, 1983, hlm: 42

- d. Rencana keadaan darurat yang berisi tindakan-tindakan penanggulangan untuk membatasi, membersihkan, serta meniadakan pencemaran oleh bahan/zat yang berbahaya itu diajukan kepada dan disetujui oleh Direktur Jenderal.
- e. Pengawasan pelaksanaan penanggulangan dan penelitian tentang gangguan dan pencemaran tata lingkungan hidup sebagai akibat dari usaha, dilakukan oleh Jenderal Direktur.

Lebih lanjut mengenai fungsi pengamanan dari segi hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa usaha-usaha industri selain mendatangkan kemakmuran bagi masyarakat, dapat mengakibatkan gangguan dan pencemaran tata lingkungan hidup.
- b. Bahwa peraturan perundangan yang telah ada belum cukup mengatur pencegahan dan penanggulangan masalah pencemaran lingkungan sesuai dengan perkembangan teknologi.
- c. Bahwa sehubungan dengan itu maka dianggap perlu untuk menetapkan ketentuan-ketentuan tentang pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan sebagai akibat dari usaha industri dan pertambangan.

F. Kesimpulan

Pengendalian pencemaran bahan berbahaya dan beracun (B3) di wilayah laut Balikpapan yang dilakukan oleh dinas lingkungan hidup Provinsi Kalimantan Timur adalah: Perusahaan pertambangan dan industri diwajibkan melaksanakan langkah-langkah pengamanan teknis terhadap B3 yang meliputi: Pengadaan, penyimpanan, pengelolaan, pengemasan, dan pengangkutan B3, makin turunnya kualitas lingkungan hidup. Karenanya limbah industri harus ditangani dengan baik dan serius oleh

pemerintah dengan mengawasi sungguh-sungguh. Sementara bagi pelaku industri harus melakukan cara-cara pencegahan pencemaran lingkungan dengan melaksanakan teknologi bersih, memasang alat pencegahan pencemaran, melakukan proses daur ulang.

G. Saran

Pengendalian pengelolaan diperlukan ketentuan hukum tegas yang mengatur tentang tata cara Pengendalian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), berbagai ketentuan umum mengenai AMDAL, Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang terbaru, serta peran aktif Pemerintah dalam mengawasi lingkungan daerah perusahaan tambang maupun industri agar tidak terjadi dampak yang merugikan bagi warga lingkaran tambang maupun nelayan tradisional, serta memberdayakan masyarakat nelayan guna meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sumber daya laut pasca pencemaran laut.

DAFTAR PUSTAKA

- Askin Mohammad, Hukum Lingkungan, Penerbit Yayasan Peduli Energi Indonesia (YPEI), Jakarta, 2008
- Abdurrahman, *Pengantar Hukum Lingkungan, Citra Adytia Bakti, Bandung*, 1990
- A. Hamid Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan Kurun Waktu Pelita I – Pelita IV, Disertasi*, Universitas Indonesia, Jakarta
- Dardji Darmohardjo, Shidarta., Pokok-pokok filsafat hukum: apa dan bagaimana filsafat hukum Indonesia, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006)

- Departemen Kehakiman RI, Penelitian tentang Aspek hukum Kerjasama Regional dan Internasional dalam Pencegahan Pencemaran Laut, (Jakarta:Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1998)
- Fuad Amsyari, Prinsip Prinsip Masalah Pencemaran Lingkungan, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1977
- H.D.van Wijk/Willem Konijnenbelt, 1988, *Hoofdstukken van administratief Recht*, Uitgeverij Lemma B.V
- Harun M. Husein, Lingkungan Hidup Masalah, Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya, Bumi Aksara, Jakarta, 1995
- Harun M. Husein, Berbagai Aspek Hukum Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Bumi Aksara, Jakarta, 1992
- Hilman Hadikusuma, Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum, Bandung: Mandara Maju, 2013
- I Nyoman Nurjaya, Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Perspektif Antropologi Hukum, diterbitkan atas kerjasama Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana, Arena Hukum Majalah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dengan Penerbit Universitas Negeri Malang (Malang: UM Press, 2006).
- Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, Dasar-Dasar Politik Hukum, Jakarta: Rajawali Pers, 2004.
- Juajir Sumardi,. Hukum Pencemaran Laut Transnasional, Citra Aditya Bakti , Bandung, 1996
- Kem. Lingk. Hidup, Program Bangun Praja, Penerbit Yayasan Peduli Energy Indonesia, Jakarta, 2003
- Mochtar Kusumaatmadja, Bunga rampai Hukum Laut, Bina Cipta, Bandung, 1978
- Mustamin Daeng. Matutu,dkk, 2004, *Mandat,Delegasi, Atribusi Dan Implementasinya di Indonesia*, UII Press Yogyakarta
- Muhammad Taufik Makarao, *Aspek-aspek Hukum Lingkungan*, Gramedia, Jakarta, 2004
- Moestadji, *Peranan Hukum Dalam Mewujudkan Konsep Pembangunan Berkelanjutan*, Artikel, Jurnal Hukum Lingkungan, Tahun I Nomor 1, ICEL, Jakarta, 1994
- N.H.T. Siahaan, Hukum Lingkungan, Pancuran Alam, Jakarta, 2009
- M. Hadin Muhjad, Hukum Lingkungan Sebuah Pengantar Untuk Konteks Indonesia, Genta Publishing, Yogyakarta, 2015
- Munadjat Danusaputro, Hukum Pencemaran dan Usaha Merintis Pola Pembangunan Hukum Pencemaran Nusantara, LITERA Bandung, 1978
- N.H.T. Siahaan, Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan, Erlangga, Jakarta, 2004
- Muhamad Erwin, Hukum Lingkungan Dalam Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2015
- R.M Gatot P. Soemarwoto, Hukum Lingkungan Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 1996
- R.R. Churcil and A.V. Lowe, *The Law of The Sea*, Manchester: Manchester University Press, 1999.
- Ridwan HR, 2006 *Hukum Administrasi Negara*, Grafindo Persada, Jakarta
- Suwoto Mulyosudarmo, *Peralihan Kekuasaan ,Kajian Teoritis dan*

*Yuridis terhadap Pidato
Nawaksara,* PT.Gramedia
Pustaka Utama, Jakarta, 1997

Sadjijono, *Memahami Beberapa Bab
Pokok Hukum Adminsitrasi,*
LaksBang Pressindo,
yogyakarta, 2008